

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sudah berjalan secara maksimal dan sudah cukup berhasil, dengan adanya perubahan yang berdampak positif bagi pelaku pelaksana kebijakan. Penelitian tentang Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan Teori George C. Edward III. Menurut Edward III, terdapat empat faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesiapan penerapan SAP Basis Akrual di DPKAD Kota Bandung, dapat disimpulkan dengan penjelasan berikut:

1. Faktor komunikasi yang baik antar pegawai pemkot dengan pimpinan dan pihak-pihak yang terkait saling berkoordinasi satu dengan yang lain mengakibatkan masing-masing personel memiliki pengetahuan mengenai kebijakan SAP basis akrual ini.
2. Faktor sumber daya yang terdiri dari staf atau pegawai yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya yang meskipun kompetensi yang kurang memadai tidak menjadi hambatan yang berarti karena adanya pengembangan kompetensi SDM berupa bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi yang diadakan secara berkala. Serta meskipun tidak ada insentif yang diberikan kepada perorangan yang memiliki dedikasi tinggi dan

melakukan kinerjanya dengan baik para pegawai tetap memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya.

3. Disposisi yang berhubungan dengan pengangkatan birokrasi harus sesuai dengan pegawai yang memiliki dedikasi terhadap pekerjaannya maupun dengan pimpinannya. Serta didukung dengan adanya insentif yang merupakan teknik potensial dalam penerapan SAP Basis Akruwal.
4. Struktur birokrasi yang berhubungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan pembagian jam kerja. Hal ini merupakan cara menghindari pemborosan waktu dalam sebuah penerapan kebijakan dan para personil melaksanakan kinerjanya dengan efektif dan efisien.
5. Secara umum Pemerintah Kota Bandung siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal penuh di tahun 2015 ini sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Minimnya jumlah data dan dokumen yang ada mengenai kesiapan pemerintah Kota Bandung dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan basis akruwal menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai kesiapan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang sekiranya mengetahui masalah yang akan diteliti.
2. Hambatan dalam prosedur birokrasi yang mempersulit peneliti untuk mendapatkan perijinan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pejabat pemerintahan.
3. Hambatan dalam melakukan wawancara dengan beberapa Informan yang merupakan pejabat administrasi sebab diperlukan waktu khusus yang sejalan dengan kompleksitas kerja. Untuk mengatasinya maka peneliti terlebih dahulu membuat janji untuk wawancara dengan informan.

C. SARAN

Frlia Dera Waliah, 2015

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di tahun 2015 ini dengan Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Perlunya meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan kompetensi sumber daya yang dimiliki oleh DPKAD Kota Bandung, agar staf tersebut dapat lebih memahami mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Karena didalam DPKAD Kota Bandung masih ada staf yang kelulusannya diluar ke akuntansian.
2. Perlunya perhatian yang lebih terhadap para personel yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pemerintah daerah dan yang sudah melakukan kinerjanya dengan baik, dengan cara pemberian insentif. Meskipun hal ini sulit untuk dilakukan karena birokrasi pemerintahan yang panjang, tetapi hal ini dapat mendorong staf untuk melaksanakan penerapan SAP Basis Akrual dengan baik.